

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL (Studi pada 10 Kota di Provinsi Jawa Timur)

Alfian Sudarsono  
sudarsono18@gmail.com  
Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*The Research of this study is Research Objectives to examine the effect of Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures capital expenditure. these variables are local own source revenue (PAD) and general allocation funds (DAU). The research population is 10 (ten) districts/cities in East Java province which consists of Surabaya City, Malang City, Gresik District, Sidoarjo District, Banyuwangi District, Pasuruan District, Kediri District, Tuban District, Jember District, Tulungagung District and the object of the research is Budget realization statement which has been presented in the result report of the Audit Board of The Republic of Indonesia and the numbers of population in. On districts/cities in East Java Province from 2013 to 2016. This examination has been carried out by using multiple linear regressions analysis technique and the instrument of SPSS application (Statistical Product and Service Solutions). The result of the research which has been done by using multiple linear regressions shows that local own source revenue (PAD) and general allocation fund (DAU) to the capital expenditure (BM), with the R-Squared 0.908 or 90.8%, it shows that the variables in the model are able to predict the local expenditure, meanwhile 9.2% is influenced by other variables which are included in the model.*

*Keywords: local own source revenue, general allocation fund, capital expenditure.*

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, variabel tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Sampel Penelitian ini adalah 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulung Agung dengan obyek Laporan Realisasi Anggaran dan jumlah penduduk dalam Kabupaten/Kota pada tahun 2013 hingga 2016. Pengujian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*statistical Product and Service Solutions*). Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dengan R-squared 0,908 atau 90,8%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum selama 2013-2016 mempengaruhi variabel terikat (Belanja Modal) adalah sebesar 90,8% dan sisanya sebesar 9,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal.

### PENDAHULUAN

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor public. Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management*.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selamaini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil; (2) Dana Alokasi Umum; (3) Dana Alokasi Khusus.

Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 ayat Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); penerimaan Pinjaman Daerah; Dana Cadangan Daerah; dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah ini harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal.

Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan adanya peningkatan fasilitas yang dapat mempengaruhi peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi daerah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan juga akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak

diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan sumber pendanaan atau ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan sumber pendanaan ini Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana Perimbangan ini bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan juga digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintah daerah serta untuk meminimalisasi resiko terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*).

Dalam mengukur keberhasilan pengembangan otonomi di daerah, dapat dilihat dengan cara membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD yang diterima setiap tahunnya. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari suatu daerah tersebut mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukan belanja daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi dan begitu pula sebaliknya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial bagi daerahnya. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan finansial yang jauh memadai sehingga mengakibatkan daerah-daerah semacam ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang meneliti mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal. Ada perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen yang mengambil seluruh komponen dari dana perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Peneliti menggunakan periode penelitian 2013-2016, karena dengan menggunakan data empat tahun terakhir diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal?; (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal; (2) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.

## TINJAUAN TEORITIS

### Otonomi Daerah

Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tujuan otonomi daerah diarahkan untuk mengacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat local (Halim, 2007).

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU No. 32 tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Mengacu kepada PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum adalah untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. Horizontal equity yaitu kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah, sedangkan yang menjadi kepentingan daerah yaitu *sufficiency* (kecukupan) terutama untuk menutupi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

Berdasarkan pada PP Nomor 55 Tahun 2005, menjelaskan bahwa DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana jumlah keseluruhan DAU ditetapkan oleh APBN yakni sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU untuk provinsi menerima sebesar 10% dan kabupaten/kota sebesar 90% dari DAU yang telah ditetapkan.

### **Belanja Modal (BM)**

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung menurut jenis belanja yang terdiri dari: (1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang; (3) Subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; (4) Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; (5) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; (6) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai denganketentuan perundang-undangan; (7) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi

kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; (8) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal (BM)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD) nya untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut. Keberhasilan desentralisasi fiskal jelas mensyaratkan keberhasilan daerah dalam mengelola potensi keuangan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Darwanto dan Yustikasari (2007) penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal telah terbukti bahwa Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (BM)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonomi (provinsi/ kabupaten/ kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

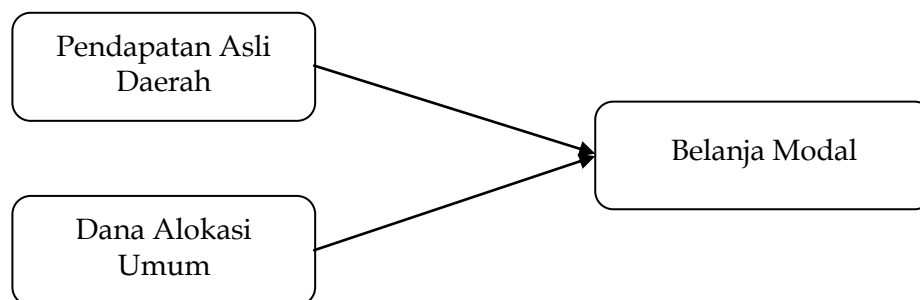
Dengan adanya DAU kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Pradita (2013) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur telah terbukti bahwa Dana Alokasi umum terbukti positif berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur.

H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM)

## Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 1**  
Rerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (causal-comparative research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timurlama tiga tahun yaitu tahun 2013-2016. Teknik yang digunakan adalah teknik "*purposive sampling*" yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti: (1) 10 Kota/Kabupaten yang memiliki tingkat pendapatan tertinggi; (2) 10 Kota/Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk tertinggi.

### Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2010) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam penelitian ini, populasinya adalah Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Teknik yang digunakan adalah teknik "*purposive sampling*" yang berarti bahwa pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu: (1) 2 Kota dan 8 Kabupaten yang memiliki tingkat pendapatan daerah tinggi; (2) 2 Kota dan 8 Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk tertinggi.

### Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang sumber datanya berasal dari dokumen laporan realisasi APBD tahun 2013-2016 yang berupa data jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Data sekunder tersebut diperoleh dari instansi Badan Pusat Statistika (BPS).

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Modal.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 32 tahun 2004). Semakin tinggi yang dihasilkan oleh PAD maka pengalokasian Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya jika PAD yang dihasilkan rendah maka pengalokasian Belanja Modal akan semakin menurun artinya PAD yang tinggi akan mengalami tercapainya perwujudan desentralisasi daerah. Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari Tahun 2013-2015. Untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Hasil\ Pengelolaan\ Kekayaan\ Daerah\ yang\ Dipisahkan + Lain-lain\ PAD\ yang\ sah.$

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum digunakan untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. Yang berarti digunakan untuk kepentingan daerah dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah.

Dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulung Agung dari Tahun 2013-2016. Untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$DAU = (\% \times bobot) \times (DAU\ Kabupaten/Kota)$

### **Belanja Modal (BM)**

Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum (Halim, 2007:73). Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Fisik lainnya. Untuk menghitung Variabel Belanja Modal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$BM = Belanja\ Tanah, Belanja\ Peralatan\ dan\ Mesin, Belanja\ Gedung\ dan\ Bangunan, Belanja\ Jalan\ Irigasi\ dan\ Jaringan + Belanja\ Fisik\ lainnya$

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis statistik dan teknik model regresi linier berganda yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Analisis ini digunakan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

### **Pengujian Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009:147). Analisis statistik deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan serta memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

### **Pengujian Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan penggunaan model regresi dan kelayakan variabel bebas. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah.

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-variabel pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan analisis *normal probability plot* dan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan berpedoman apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi data normal dan apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal. Pada uji normalitas ini, jika terdapat distribusi data tidak normal maka dilakukan transformasi data agar menjadi data yang normal.

Uji Multikolinearitas menurut Ghozali (2006) yaitu, jika model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance value*  $> 0,01$  dan VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mengatasi masalah multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara yaitu menambahkan sampel, melakukan transformasi variabel, dan mengeluarkan satu variabel atau lebih yang memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel lain.

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier, terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pada uji ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson* dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Jika nilai DW berada diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi; (2) Jika nilai DW berada dibawah  $-2$  berarti terdapat autokorelasi positif; (3) Jika nilai DW berada diatas  $+2$  berarti terdapat autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji statistik ini yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel dependen (*ZPRED*) dan residualnya (*S-RESID*). Apabila pada titik-titik pada grafik tersebut menyebar secara acak tidak membentuk pola dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### **Pengujian Regresi Linier Berganda**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah persyaratan dari uji asumsi klasik telah terpenuhi. Dalam penelitian ini regresi linier berganda digunakan untuk menguji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum



(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. Adapun persamaan model regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$BM = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + e$$

Keterangan:

- BM : Belanja Modal
- a : Konstanta
- $\beta$  : Koefisien Regresi
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- e : Standar Error

### Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan pengujian terhadap hipotesis untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari koefisien determinasi (F) uji kelayakan model (R<sup>2</sup>) dan uji statistik t.

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan ukuran untuk menguji seberapa jauh model regresi mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen dengan memiliki nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) antara nol dan satu. Semakin besar nilai R<sup>2</sup> atau mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, namun sebaliknya jika semakin kecil nilai R<sup>2</sup> atau mendekati nol berarti menunjukkan pengaruh yang semakin melemah.

Uji F dikenal dengan Uji model/ Anova yang digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak dan uji ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , dimana ditentukan jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Jika nilai probabilitas  $\leq 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan.

Pengujian parsial digunakan Uji t, menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dimana tingkat signifikansinya ditentukan dengan nilai probabilitas atau dengan membandingkan nilai t<sub>hitung</sub> dengan t<sub>tabel</sub>. Uji ini dapat dilihat jika t<sub>hitung</sub> < t<sub>tabel</sub>, maka H<sub>0</sub> ditolak artinya tidak ada pengaruh antara PE, PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. Sebaliknya apabila t<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub>, maka H<sub>0</sub> diterima artinya ada pengaruh antara PAD dan DAU terhadap belanja modal.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X1)	40	174981707	4035339014	736068394,12	955947485,73
DAU (X2)	40	746686937	1709892845	1114882773,07	217139130,94
BM (Y)	40	153095137	2059459145	612200706	441805012,55
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Pada variabel independen pertama, Dana Alokasi Umum (DAU), nilai rata-ratanya adalah Rp 1.114.882.773,07, nilai tertingginya Rp 1.709.892.845, nilai terendahnya Rp 746.686.937 dan standar deviasi Rp 217.139.130,94 menunjukkan adanya variasi yang besar (lebih dari 30% dari nilai mean).

Pada variabel kedua yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 736.068.394,12, nilai tertinggi sebesar Rp

4.035.339.014, nilai terendah sebesar Rp 174.981.707 dan nilai standar deviasinya adalah Rp 955.947.485,73 menunjukkan adanya variasi yang besar karena nilainya yang lebih besar 30% dari nilai mean.

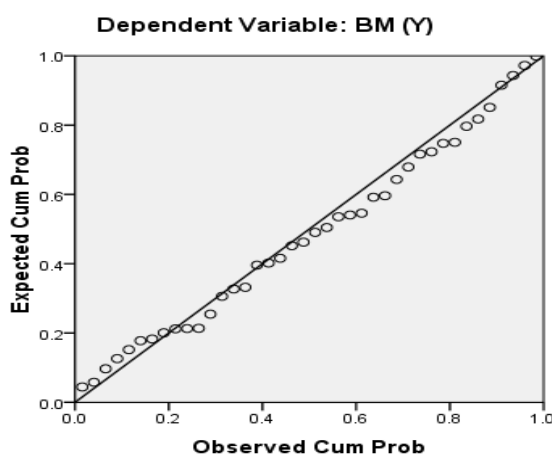
Tabel statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Belanja Modal (BM) yang merupakan variabel dependen adalah Rp 612.200.706, nilai tertingginya Rp 2.059.459.145 dan nilai terendahnya Rp 153.095.137 sedangkan nilai standar deviasinya menunjukkan Rp 441.805.012,55 dimana nilainya lebih dari 30% nilai rata-rata.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dari grafik dalam lampiran, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Gambar 1  
Grafik P-Plot

Tabel 2  
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	134114585,33732710
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,046
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 diatas hasil pengujian normalitas terhadap 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* sebesar 0,968 lebih besar dari 0,05.

**Uji Multikolinearitas**

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai *Tolerance value* dan VIF (Variance Inflation Factor). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas adalah nilai *tolerance value* diatas 0,10 dan VIF.

Dari hasil yang telah dianalisis dan diuji yang menunjukkan pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance value diatas 0,10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak ada yang mengandung adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 PAD (X1)	.986	1.014
DAU (X2)	.986	1.014

a. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut (*times-series*) atau ruang (*cross section*). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,953 <sub>a</sub>	,908	,903	137691601,93511	1,544

a. Predictors: (Constant), DAU (X2), PAD (X1)

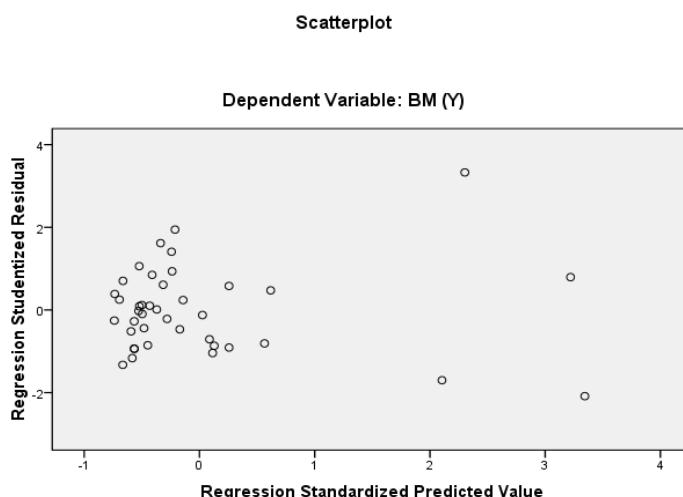
b. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,544 terletak diantara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama (*konstan*) atau yang bisa disebut homoskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik.



Sumber: Data sekunder diolah, 2018

**Gambar 2**  
Grafik *scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tampilan pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Analisis Regresi Berganda

Dari hasil output SPSS seperti pada tabel, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

**Tabel 5**  
Hasil Estimasi Koefisien Regresi  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-100578801,977	115333528,521		-,872	,389
PAD (X1)	,423	,023	,915	18,213	,000
DAU (X2)	,360	,102	,177	3,520	,001

a. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

$$BM = -1.006E8 + 0.423PAD + 0.360DAU + e$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Nilai koefisien regresi 0,360 menyatakan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah sebesar 36,0%. Nilai koefisien regresi 0,423 menyatakan bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal pemerintah sebesar 42,3%.

**Goodness of Fit (uji F)**

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

**Tabel 5**  
**Hasil Perhitungan Goodness of Fit (Uji F)**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6910992937551992800,00	2	3455496468775996400,00	182,262	,000 <sup>b</sup>
	Residual	701482158007928830,00	37	18958977243457536,00		
	Total	7612475095559921700,00	39			

a. Dependent Variable: BM (Y)

b. Predictors: (Constant), DAU (X2), PAD (X1)

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 6 diatas diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 182.262 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai F memberikan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

**Koefisien Determinasi (Uji R)**

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variansi perubahan pada variabel dependen. Berikut hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel7:

**Table 7**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,953 <sup>a</sup>	,908	,903	137691601,93511	1,544

a. Predictors: (Constant), DAU (X2), PAD (X1)

b. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Nilai koefisiensi determinasi atau *R square* dalam penelitian ini sebesar 0,908 atau sebesar 90,8%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu PAD dan DAU selama 2013-2016 mempengaruhi variabel terikat (BM) adalah sebesar 90,8% dan sisanya sebesar 9,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

**Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap Belanja Modal. Dengan tingkat signifikansi  $\leq 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS ditunjukkan pada tabel 8 berikut ini:

Table 8  
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-100578801,977	115333528,521		-,872	,389
PAD (X1)	,423	,023	,915	18,213	,000
DAU (X2)	,360	,102	,177	3,520	,001

a. Dependent Variable: BM (Y)

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 18.213 dengan tingkat signifikan 0,000 nilai signifikan tersebut < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal; (2) Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 3.520 dengan tingkat signifikan 0,001 nilai signifikan tersebut < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## Pembahasan

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini juga dapat ditemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal juga akan semakin tinggi. Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan bahwa besarnya PAD tidak menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2017), dan Nuarisa (2013) yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal.

Jika pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut dengan mempertimbangkan PAD yang diterima (Nuarisa 2013). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak PAD yang diterima oleh daerah maka semakin banyak pula daerah dapat mengalokasikan dana untuk anggaran belanja modal daerah tersebut. Karena PAD merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah daerah itu sendiri. Meskipun PAD jumlahnya sedikit tetapi PAD sangat berpengaruh, tidak hanya untuk alokasi belanja modal tetapi juga dapat digunakan untuk belanja operasional. Selain itu, semakin tinggi PAD yang diterima mencerminkan kemandirian daerah, yang artinya daerah tersebut semakin tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat. Maka dari itu, hendaknya Pemerintah Daerah lebih terpacu lagi untuk lebih memanfaatkan sumber daya daerah yang tersedia guna meningkatkan PAD.

### Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003) yang

menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, besarnya jumlah belanja modal dipengaruhi Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat.

Pengaruh signifikan antara DAU dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai oleh DAU tersebut. Bahkan Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi DAU terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakatpun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sektor usaha kecil masih terabaikan, contohnya PKL).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, variabel yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sampel Penelitian ini adalah 8 (Delapan) Kabupaten dan 2 ( Dua) Kota di wilayah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulung Agung dengan obyek Laporan Realisasi Anggaran dan jumlah penduduk dalam Kabupaten/Kota pada tahun 2013 hingga 2016. Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, seluruh Variabel independen dalam model secara simultan memiliki kemampuan prediksi dengan R-Squared 0,908 atau 90,8% dapat memprediksi Belanja Daerah. Sedangkan 9,2 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: (1) Untuk dapat meningkatkan belanja modal, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan tidak terbatas hanya pada 10 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, sehingga penelitiannya disimpulkan secara umum; (3) Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih menambahkan variabel independen yang lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja daerah, seperti ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kondisi makro ekonomi atau kebijakan pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah dan Halim. 2003. Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 7 (1)
- Darwanto dan Y. Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Edisi III, 1, Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba Empat Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Nuarisa, S.A. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. Semarang.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- . Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- . Nomor 104 Tahun 2000 tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
- Pradita. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*1(2). Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.